



Godok Sekolah Gratis 12 Tahun

Hapus Investasi Siswa SMA/SMK

JOGJA - Wajib belajar 12 tahun tak hanya sebagai slogan. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja saat ini sedang menggodok realisasi wajib belajar sampai tingkat SMA/SMK tersebut. Hal pokok yang dibahas adalah pembebasan biaya bagi warga Kota Jogja sejak SD sampai SMA/SMK.

"Saat ini kami masih melakukan perhitungan kebutuhan anggarannya dengan mengundang sekolah-sekolah negeri," kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja Sugeng Mulyo Subono saat rapat kerja (raker) dengan Komisi D di gedung DPRD Kota Jogja kemarin (8/11).

Sugeng menjelaskan, perhitungan tersebut sangat penting. Sebab, langkah itu untuk menentukan besaran dana APBD yang dibutuhkan. Apalagi, biaya untuk siswa di SMK dinilai besar jika semuanya dibebankan ke APBD. "Kami belum bisa memastikan karena SMK butuh sangat besar," tuturnya.

Pembebasan biaya bagi siswa tingkat SMA/SMK ini, lanjut Sugeng, berlaku bagi semua siswa di sekolah negeri dan swasta. Hanya, tak semua biaya untuk siswa swasta digratiskan. Disdik berniat memberikan bantuan biaya kepada siswa yang rentan secara sosial.

"Bagi pemegang KMS jelas. Yang lain, mungkin akan menggunakan keterangan tidak mampu," imbuhnya.

Penggratiskan siswa di tingkat SMA/SMK ini juga bertujuan menghilangkan adanya

sekolah unggulan. Artinya, sekolah favorit yang secara fasilitas sarana dan prasarana unggul menjadi tak ada. Sebab, seluruh pengadaan sarana dan prasarana akan menggunakan dana APBD.

"Akan mengacu standard nasional sesuai dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007," jelasnya.

Semua program tersebut akan masuk dalam Rencana Induk Pendidikan (RIP). Cetak biru pendidikan ini juga akan mengatur proses tahapan pembebasan biaya investasi. Tujuan akhirnya adalah kualitas pendidikan di Kota Jogja baik dari sisi sarana dan prasarana maupun hasil akhir yang berkualitas.

Berdasar penjelasan Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Sujanarko, hingga akhir 2012 sebenarnya sudah mulai tahap pen-

gurangan biaya operasional yang ditarik dari investasi siswa. Tahun ini APBD Perubahan Kota Jogja telah menganggarkan Rp 4,1 miliar untuk praktik ujicoba *close circuit television* (CCTV) dan *landscape* sekolah. "Tahun 2013, dari biaya operasional pendidikan senilai Rp 34 miliar, sekitar 25 persennya atau Rp 8 miliar, sudah dibiayai APBD," sambungnya.

Dia menambahkan, jumlah tersebut berpeluang bertambah. Ini mengingat perhitungan dari potensi pajak daerah maupun biaya operasional pendidikan masih berlangsung.

"Kalau kemampuan keuangan meningkat, ya otomatis juga akan meningkat. Tujuan akhir ini kan merealisasikan sarana sekolah di Kota Jogja ini di atas standard rata-rata nasional," tandasnya. (eri/amd)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005